

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara (Kementrian Pertanian, 2020: 39).

Paradigma pembangunan di Indonesia selama ini didominasi oleh paradigma yang meletakkan peran pemerintah pada posisi sentris, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Paradigma ini mendapatkan tentangan dari berbagai pihak karena paradigma ini sangat tidak mempercayai kemampuan masyarakat dalam membangun diri. Hal ini mengakibatkan banyak proyek dan program pembangunan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat (Jacob, 2000 dalam Sukirno, 2013:59). Untuk itu, upaya pembangunan seharusnya berpusat kepada masyarakat itu sendiri agar sesuai dengan aspirasinya.

Pembangunan dalam kerangka paradigma yang berpusat pada manusia atau rakyat (*people-centered*) adalah suatu proses di mana manusia meningkatkan kemampuannya baik kemampuan teknik, kelembagaan maupun insaninya untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan, untuk mencapai peningkatan yang berkelanjutan di dalam kualitas hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia pada mereka (Korten, 1995:168 dalam Nanga, 2000:74). Secara garis besar paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat menekankan pada hal-hal sebagai berikut: (1) bahwa individu atau masyarakatlah yang harus menjadi aktor utama dari pembangunan sehingga mereka yang harus menentukan tujuan yang ingin dicapai, menguasai sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidup mereka; (2) pemerintah hanya sebagai fasilitator; (3) penguatan kapasitas kelembagaan dan sosial individu dan masyarakat; dan (4) perlu adanya suatu proses demokratisasi dengan adanya

kontrol atas aset ekonomi dan politik serta keterbukaan arus informasi (Nanga, 2000:75). Keempat hal ini dapat diwujudkan dengan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.

Pembangunan pada saat ini telah berkembang sangat pesat di Indonesia. Pembangunan tersebut meliputi berbagai bidang, seperti bidang sosial, politik, ekonomi dan pendidikan. Pelaksanaan pembangunan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Pembangunan yang dilakukan di daerah pedesaan tidak kalah berkembangnya dengan pembangunan yang dilakukan di daerah perkotaan. Saat ini, pemerintah kebanyakan lebih memfokuskan pembangunan di daerah perkotaan saja, namun seiring berjalannya waktu tersebut lambat laun mulai berubah, dimana pembangunan di pedesaan juga sangat menunjang perekonomian negara. Salah satunya adalah pada sektor pertanian yang merupakan sumber kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pengembangan SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang handal dan professional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. salah satunya dengan penguatan kelembagaan petani dengan langkah penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Kementerian Pertanian, 2020 :67).

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Pemberdayaan harus menjadi tujuan dari semua pembangunan masyarakat. Pengembangan masyarakat, bagaimanapun, dapat memiliki tujuan pemberdayaan lebih sederhana. Demikian pula, setiap strategi yang memperkuat struktur yang menentang pemberdayaan mungkin justru melemahkan dari pada memperkuat kegiatan masyarakat. Bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan masyarakat petani adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dalam melakukan usaha secara berkelanjutan.

Pemberdayaan zakat secara nasional untuk kesejahteraan umat menjadi perhatian penting pemerintah dan juga masyarakat mengingat kondisi sosial masyarakat yang sulit keluar dari belenggu kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Secara konseptual, zakat memiliki dimensi pengetahuan dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat dapat diposisikan dalam dua hal: pertama, dengan seluruh potensi yang ada maka zakat dapat menjadi harapan bagi salah-satu solusi dalam pemberdayaan umat. Kedua, pertumbuhan zakat yang terus meningkat dari tahun ketahun mengindikasikan adanya harapan mempertegas upaya pemberdayaan untuk keluar dari berbagai persoalan sosial. Hanya saja, kedua kondisi yang terkait dengan pertumbuhan zakat tersebut harus diiringi dengan penguatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat sekaligus memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga pengelola zakat untuk mendayagunakan harta zakat demi kepentingan umat (Kementerian Agama RI, 2013: 4)

Harus diakui bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui zakat membutuhkan perangkat dan kriteria yang tidak mudah. Sebagaimana diuraikan oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan bahwa kriteria dasar pemberdayaan masyarakat adalah: pertama, adanya partisipasi kelompok masyarakat miskin dalam penyelenggaraan program. Kedua, ditandai oleh penyediaan alokasi dana secara langsung kemasyarakat dan. Ketiga, penyelengraan program yang ditandai oleh sistem yang transparan dan diawasi oleh pendampingan serta masyarakat. Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga manapun di dunia selalu berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memberantasan kemiskinan sebagai momok kehidupan masyarakat.

Pemberdayaann masyarakat yang dilakukan harus didukung oleh program-program yang langsung menuju pada ketepatan sasaran program tersebut harus dilandaskan pada arah yang strategis yaitu: masyarakat sebagai pelaku utama penyelenggaraannya bersifat partisipatif, akuntabel, transparan, dan mempertimbangkan kesetaraan status manusia antara laki-laki dan perempuan; serta adanya ketersediaan sumberdaya, sumberdana dalam pemdampingan yang konsisten. (Kementerian Agama RI, 2013 : 97-98)

Kota Padang adalah salah satu kota yang masih sangat memandang perlunya pemberdayaan masyarakat petani. Faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan

masyarakat yaitu; yang pertama faktor internal ialah masih banyak yang belum memiliki badan hukum, struktur organisasi yang belum tertata dengan baik, lemahnya modal, partisipasi anggota rendah, serta penguasaan teknologi rendah. Dan kedua faktor eksternal ialah yang mempengaruhi pemberdayaan kebijakan pemerintah, tuntutan masyarakat untuk pemberdayaan petani, persaingan usaha, terbatasnya pengetahuan teknologi, dan perbedaan persepsi sesama petani.

Memberdayakan masyarakat merupakan upaya peningkatan kualitas keluarga yang mandiri dan ketahanan keluarga yang tinggi dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mencapai ketahanan pangan keluarga dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas sumberdaya alam yang ada di lingkungan sekitarnya.

pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menjadikan masyarakat yang kuat terhadap masalah-masalah yang dihadapinya, diantaranya masalah ekonomi, masalah ekonomi yang kian meraut dalam benak pikiran masyarakat yang menjadi masalah utama bagi masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata ditengah harga pokok yang kian terus menaik.

### **B. Rumusan masalah**

Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi resiko kemiskinan bagi masyarakat Kota Padang adalah mengadakan Program Puyuh Petelur oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang, diharapkan dengan adanya program ini mampu mengurangi masalah kemiskinan tersebut.

BAZNAS Kota Padang memulai pemberdayaan ini sejak Juni 2019 yang dilakukan di Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Limau Manis, Kota Padang. Penentuan lokasi ini dilakukan oleh BAZNAS sendiri dengan cara berkunjung ke lokasi yang akan dijadikan objek penerapan pemberdayaan masyarakat. BAZNAS memberikan program Puyuh Petelur untuk KWT Melati Mini, Pemberdayaan ini bertujuan untuk membimbing KWT Melati Mini dalam pembuatan usaha sendiri dan memiliki penghasilan sendiri, yang nantinya dari hasil tersebut dapat membantu ekonomi keluarga di Kelurahan Koto Luar.

KWT Melati Mini ini terdiri dari 23 orang anggota yang terdiri dari Ibu Rumah Tangga, dari 23 anggota dipilih 10 anggota yang ikut dalam program puyuh petelurelah BAZNAS sehingga dengan adanya program tersebut diharapkan dapat membantu sumber penghasilan untuk menunjang ekonomi keluarga. Pemberdayaan yang diberikan oleh BAZNAS yaitu program Puyuh Petelur, Untuk KWT Melati Mini kandang ditempatkan di samping rumah masing-masing anggota (Lampiran 2), sehingga memudahkan anggota dalam mengawasi perkembangan Puyuh Petelur tersebut. Dan 10 anggota yang lain mendapatkan program lele bioflok.

Program puyuh petelur dari BAZNAS Kota Padang adalah salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan bagi masyarakat di Kota Padang yang tidak mampu. Kemiskinan di kota ini masih tergolong tinggi, ribuan penduduk masih berpenghasilan rendah, tentu saja kondisi tersebut akan berdampak negatif bagi warga itu sendiri terutama perekonomiannya. Sasaran utama dari Program Puyuh Petelur BAZNAS Kota Padang kali ini adalah warga yang berpenghasilan rendah dan masuk kategori tidak memiliki penghasilan tetap yang layak untuk menunjang kebutuhan hidupnya sendiri.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka sebagai pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh BAZNAS di KWT Melati Mini?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat oleh BAZNAS di KWT Melati Mini?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat oleh BAZNAS di KWT Melati Mini Kelurahan Koto Lua Kecamatan Pauh Kota Padang”**

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh BAZNAS di KWT Melati Mini.
2. Mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat petani tentang penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat oleh BAZNAS di KWT Melati Mini

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis, praktisi dan bagi dunia akademis sebagai berikut:

##### **1. Mamfaat Praktis**

Secara dapat memberikan masukan tentang bagaimana memberdayakan dan mendampingi masyarakat miskin menjadi masyarakat yang tangguh/mandiri. Bagi instansi terkait, hal ini dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan perekonomian, memecahkan masalah dan memberikan saran yang bermamfaat bagi instansi, serta memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat ataupun penelitian lainnya untuk penelitian selanjutnya.

##### **2. Mamfaat Teoritis**

Secara teoritis, Hasil penelitian ini akan memperkaya penelitian, khususnya tentang pemberdayaan masyarakat oleh BAZNAS, serta dapat digunakan sebagai pembandingan dalam penelitian selanjutnya, baik dalam model, cara analisis, ataupun hasilnya.

3. Bagi dunia akademis, penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang harus di tempuh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh getar sarjana pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

